

Tinjauan Terhadap Tindakan Pengumuman dan Perbanyakan Video Melalui Situs YouTube Secara Melawan Hukum

(Studi Kebijakan dan Ketentuan Hak Cipta Dalam Situs YouTube)

Andika Andre Pratista, Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S,

M.Zairul Alam, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

andikapratista@gmail.com

Abstrak

Di era globalisasi seperti ini dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah. Kini teknologi merupakan sarana yang merambah hampir keseluruhan sektor kehidupan. Salah satu dampak dari kemajuan teknologi adalah munculnya era digital yang ditandai dengan munculnya tiga teknologi, yaitu: Komputer, Komunikasi, dan Multimedia. Dengan perkembangan konvergensi ketiga teknologi telah membuat muatan informasi atau pesan dalam komunikasi tidak lagi hanya berupa teks, angka, gambar saja, melainkan dapat berupa suara atau bahkan berupa gambar bergerak (film/Video). Di era digital seperti sekarang ini, video menjadi hal yang sangat diminati oleh masyarakat, salah satu situs berbagi video atau video *sharing* terpopuler dan paling banyak dikunjungi adalah YouTube. Banyak masyarakat pengguna Youtube tidak mengetahui bahwa video-video yang ada di Youtube sebagian besar bermateri hak cipta dan karya-karya bermateri hak cipta tersebut sering disalah gunakan oleh pengguna Youtube, bahkan digunakan untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik video.

Kata kunci : Internet, Hak Cipta, YouTube

Abstract

In this era of globalization such as the advancement of information and communication technology is rapidly increasing needs of the community is also increasing rapidly. Now that technology is a means of reaching almost throughout the life sector. One of the effects of technological progress is the advent of the digital age is characterized by the appearance of three technologies, namely: Computer, Communication, and Multimedia. With the development of technology has made the third convergence of information payload in a communication or message is no longer just be text, numbers, images only, but can be a sound or even a moving image (film / video). In today's digital age, the video becomes very high demand by the public, one of the video sharing site or video sharing most popular and most visited is YouTube. Many people do not know that the YouTube user videos available on Youtube largely immaterial copyright and immaterial works of

copyright is often misused by Youtube user, even used for commercial purposes without permission of the owner of the video.

Keyword: Internet, Copy Right, YouTube

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Peran teknologi komunikasi semakin penting yang lebih dipicu oleh kebutuhan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan tuntutan jaman yang serba mengglobal, di mana memerlukan teknologi komunikasi yang efisien dan dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas negara. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah internet.¹

Dari kondisi demikian, tak dapat disangkal lagi bahwa kehadiran internet telah memunculkan suatu fenomena baru terhadap aspek-aspek kehidupan manusia. Dari sisi hukum, fenomena internet sangat jelas berpengaruh terhadap model pengaturan hukum di internet. Seperti diketahui penerapan hukum saat ini pada kenyataannya masih banyak memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan itu antara lain sangat dibatasi dengan yurisdiksi dan sangat bergantung dengan hal-hal yang sifatnya formal.²

Kelemahan yang dimiliki hukum konvensional saat ini menunjukkan juga kompleksitas dari objek yang diatur. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Larry Lessig yang menyatakan:

¹ Sejarah berkembang nya teknologi ini melibatkan empat aspek berbeda yang saling terintegrasi, yakni :

- a. Aspek teknologi, yaitu diawali dengan sebuah riset dalam *Packet Switching dan ARPANET*
- b. Aspek operasional dan manajemen yaitu, untuk mengatur secara operasional infrastruktur yang kompleks dan bekerja secara global.
- c. Aspek sosial, yaitu aspek ini menghasilkan suatu komunitas internet yang luas tempat mereka saling bekerja sama untuk mengembangkan teknologi baru.
- d. Aspek komersialisasi, yaitu dengan menghasilkan suatu perubahan yang sangat efektif dari sebuah penelitian menjadi sebuah infrastruktur penyedia dan penyebar informasi yang mencakup wilayah yang luas.

D.Friedman P, **Analisis Hak Konsumen Dalam Hal Perolehan Karya Cipta Lagu Melalui Internet dalam pola *peer to perr communication* Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**, Tesis tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hal 2.

² Misalnya dalam konteks hukum pembuktian di Indonesia masih menekankan kepada alat bukti yang sifatnya tertulis dan biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen kertas. Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal 87.

*“Cyberspace is a new and exciting frontier, and presents a host of new and difficult legal questions in many areas. The development of legal rules that will govern activity in this new environment is likely to be a complex, and at times a controversial, process.”*³

Kompleksitas pengaturan ini, melahirkan berbagai permasalahan hukum. Salah satu permasalahan hukum tersebut adalah hak cipta.⁴ Hak cipta⁵ pada dasarnya adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri dari buku, program komputer, ceramah kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta.⁶

Ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, mengimpor atau mengeksport, memamerkan, mempertunjukan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Secara tradisional Hak cipta telah diterapkan kedalam buku-buku, tetapi sekarang hak cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik, dan artistik, termasuk rekaman suara, dan televisi serta program komputer.⁷

Di era globalisasi seperti ini dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah.

³ Larry Lessig, *Introduction of Cyberspace, Cyberspace Law for Non-Lawyers*, [Http://www.eff.org/legal/Cyberlaw_Course/Cyberlaw.001](http://www.eff.org/legal/Cyberlaw_Course/Cyberlaw.001), diakses 13 agustus 2013.

⁴ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo (Eds), **Hak Kekayaan Intelektual (suatu pengantar)**, PT. Alumni, Bandung, 2011, hal 6

⁵ Indonesia, **Undang-Undang Tentang Hak Cipta**. UU. No.19, LN no.57 Tahun 1994, TLN No.3654, ps 1 angka 1. Bahwa yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶ Tomatzu Hazumi, *ASIAN copyright handbook Indonesian version*, Asia Pacific Cultural Center for Unesco, 2004, hal 15-16.

⁷ Ibid.

Kini teknologi merupakan sarana yang merambah hampir keseluruhan sektor kehidupan. Salah satu dampak dari kemajuan teknologi adalah munculnya era digital yang ditandai dengan munculnya tiga teknologi, yaitu: Komputer, Komunikasi, dan Multimedia.⁸ Dengan perkembangan konvergensi ketiga teknologi telah membuat muatan informasi atau pesan dalam komunikasi tidak lagi hanya berupa teks, angka, gambar saja, melainkan dapat berupa suara atau bahkan berupa gambar bergerak (film/Video).⁹

Di era digital seperti sekarang ini, video menjadi hal yang sangat diminati oleh masyarakat, dengan video masyarakat bisa mendapatkan banyak manfaat, manfaat tersebut dapat dibidang ilmu pengetahuan, sarana pengenalan produk, dan sarana hiburan. Salah satu situs berbagi video atau video *sharing* terpopuler dan paling banyak dikunjungi adalah YouTube.¹⁰ Youtube adalah sebuah situs web *video sharing* dan situs tempat menyimpan video baik itu video dokumentasi ataupun video pribadi. Para pengguna Youtube tidak perlu membuat *account* untuk mengirim video ke Youtube dan menikmati fitur-fitur yang tersedia di situs ini, Youtube juga mengemas situsnya dengan format menu yang mudah dipelajari dan pengunggahan yang tidak rumit. Karena kemudahan yang ditawarkan oleh Youtube, hal ini menjadikan Youtube sangat populer di masyarakat. Menurut survey dari lembaga peneliti Internet *Hitwise* lebih dari 2 (dua) miliar pengunjung mengunjungi youtube perharinya, dengan demikian menjadikan youtube situs *video sharing* terbesar di jagat dunia maya.¹¹

Dengan banyaknya pengguna youtube dan sebagian besar video yang ada di Youtube bermateri hak cipta, hal ini menimbulkan masalah hukum dibidang hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Banyak masyarakat pengguna Youtube tidak mengetahui bahwa video-video yang ada di Youtube sebagian besar bermateri hak cipta dan karya-karya bermateri hak cipta tersebut sering

⁸ Gene K. Landy, *The IT/Digital Legal Companion (A Comprehensive Business Guide to Software, IT, Internet, Media and IP Law)*, USA, hal 46

⁹ Paul Goldstein, **Hak Cipta : Dahulu, kini, dan esok.**, yayasan obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm.23-24

¹⁰ Youtube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis.

¹¹ Hitwise, 2013, **Survei Pengguna YouTube**, <http://www.hitwise.com/news/yt2012.html>, diakses 13 agustus 2013.

disalah gunakan oleh pengguna Youtube, bahkan digunakan untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik video.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan masalah sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti adalah:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pencipta atas adanya konten yang di-*upload* melalui youtube menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- b. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa apabila ada pelanggaran hak cipta yang terjadi di youtube menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

B. Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Bagi Pencipta Atas Adanya Konten Yang di-Upload Melalui YouTube

a. Perlindungan Hak Cipta didalam *WIPO Copyright Treaty* (WCT)

Hak cipta merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual yang terkait erat dengan *Digital Right Management* (DRM). Keterkaitan ini dikarenakan hak cipta merupakan bidang yang dari segi isi digital mempunyai relevansi yang tinggi. Sebagaimana diketahui hak cipta merupakan hak hukum yang diberikan terhadap karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan serta sarana kontrol teknologi. Pada dasarnya *Digital Right Management* hanya berkaitan dengan ketentuan teknologi yang dikembangkan saat ini, yang mana bertujuan untuk melindungi materi hak cipta dan eksploitasinya.

Digital Right Management meliputi 2 (dua) sitem perlindungan, yaitu: perlindungan yang terkait dengan *Technological Protection Measures* (TPM) dan yang kedua adalah *Rights Management Information* (RMI). TPM dimaksudkan untuk melindungi karya digital baik berupa menghalangi akses atas karya tersebut dengan proteksi teknologi, juga berfungsi sebagai kontrol agar karya digital tersebut tidak diperbanyak atau diubah tanpa izin. RMI dimaksudkan disini sebagai upaya proteksi akan informasi yang menjadi identitas produk tersebut, informasi tersebut baik yang

menerangkan ciptaan, siapa pencipta, pemegang hak, dan hal-hal yang relevan dengan ciptaan digital tersebut.¹²

Dalam teks *WIPO Copyright Treaty* sendiri tidak ada digunakan pengertian DRM. Tetapi fungsi perlindungan teknologi atas karya digital tercakup dalam pengertian *Technological Protection Measures* dan *Right Management Information* yang diatur dalam pasal 11 dan 12 WCT.

b. Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang ITE pada dasarnya mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Yang tergolong informasi dalam Undang-Undang ini tak terbatas pada tulisan, gambar atau suara, tapi juga *e-mail*, telegram dan lainnya. Jangkauan Undang-Undang ini sangat luas, sebagaimana yang tercantum pada undang – undang ITE yang menyatakan:¹³

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Menurut pasal 2 UU ITE menyiratkan bahwa peraturan ini menganut asas ekstrateritorial, yang berarti kepanjangan secara semu (*quasi extentio*) dari yurisdiksi suatu Negara di wilayah yurisdiksi Negara lain,¹⁴ pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk menegakan hukum sepanjang ada pelanggaran terhadap peraturan tersebut, serta ada kepentingan bangsa Indonesia yang dirugikan.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengakui adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu pasal yang melindungi

¹² M. Zairul Alam, *Protection of Copyright Management Information in Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

¹³ UU ITE, pasal 2

¹⁴ Muhamad Rakhmanaji, *Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Kasus Perusakan Kedutaan Besar Inggris di Iran*, ALSA Indonesia, 2012.

Hak Kekayaan Intelektual ada pada pasal 25 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:¹⁵

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah karya – karya intelektual yang sudah didaftarkan sebagai hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya. Selanjutnya menurut penjelasan pasal 25 UU ITE, berbunyi:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Jadi menurut penjelasan pasal 25 UU ITE, informasi elektronik dan dokumen elektronik yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang – undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual karena informasi elektronik atau dokumen elektronik memiliki nilai ekonomis bagi penciptanya.

Selain itu, terdapat pula bentuk perlindungan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, hal ini terdapat dalam Pasal 32 ayat 1 UU ITE yang mengatur mengenai larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

Demikian pula Pasal 32 ayat 2 UU ITE mengatur larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

¹⁵ UU ITE, pasal 25

Serta pasal 32 ayat 3 yang mengatur perbuatan sebagaimana dimaksud pada 32 ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Apabila tindakan dalam pasal 32 UU ITE dilihat dari sudut pandang hak cipta, tindakan pasal 32 ayat 1 maupun pasal 32 ayat 2 merupakan bentuk dari tindakan pengumuman dan perbanyakan tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta, tindakan pengumuman dan perbanyakan merupakan tindakan yang melanggar hukum menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

c. Pengaturan Hak Cipta Terhadap Konten Digital (YouTube)

Youtube adalah sebuah situs web video sharing dan situs tempat menyimpan video, di dalam youtube mempunyai aturan mengenai Hak Cipta yang mengadaptasi dari aturan hukum hak cipta yang ada di Amerika yaitu *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* .

Di dalam situsnya Youtube membuat halaman yang mengatur mengenai hak cipta, agar pengguna youtube bisa mengetahui lebih dalam mengenai hak cipta, bentuk perlindungan dan apa saja akibat hukum apabila melakukan pelanggaran hak cipta di dalam situsnya. Di halaman hak cipta youtube tidak menjelaskan secara rinci pengertian hak cipta, tetapi mengatur jenis-jenis karya apa saja yang harus mematuhi hak cipta, bagaimana cara menggunakan karya-karya yang bermateri hak cipta tanpa melanggar, keputusan hak cipta, perbedaan antara hak cipta, merek dagang dan paten, serta perbedaan antara hak cipta dan privasi.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta di Youtube Menurut Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

a. Dasar-dasar gugatan Hak Cipta

Hukum hak cipta pada era digital mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terutama pada lingkup perlindungannya. Sebelumnya lingkup perlindungan hak cipta hanya terfokus pada objek-objek ciptaan yang konvensional. Akan tetapi, dengan hadirnya era ini, maka objek perlindungan

hak cipta mengalami perluasan. Objek perlindungan hak cipta telah merambah pada bentuk-bentuk kreasi berupa seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang didigitalisasikan.

Konsekuensi dari kreasi yang terdapat pada *medium digital*, seperti internet ternyata berdampak juga pada permasalahan hukum. Salah satunya pada hukum hak cipta. Permasalahan ini sangat terasa ketika di dalam dunia internet muncul situs video *sharing* yang cukup fenomenal yaitu YouTube, menurut data statistik penayangan di Youtube lebih dari 6 miliar jam video ditonton di Youtube setiap bulannya, bila dikalkulasikan ini sama saja dengan satu jam untuk setiap orang di Bumi.¹⁶

Aktifitas di Youtube juga tidak luput dari kejahatan dan pelanggaran, salah satu jenisnya adalah hak cipta. Selain hak cipta ada beberapa hal yang merupakan pelanggaran di Youtube:

1. Privasi

Ini dapat terjadi apabila seseorang mengeksposkan informasi pribadi atau meng-*upload* video tentang seseorang tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.

2. Pelecehan dan penindasan maya

Pelecehan dan penindasan maya dapat meliputi; membuat pesan yang kasar, merekam seseorang untuk tujuan kejahatan tanpa persetujuannya, membuat video negatif dan menyakitkan tentang orang lain.

3. Perkataan yang mendorong kebencian

Perkataan yang mendorong kebencian mengacu pada konten yang menyerukan kekerasan atau kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu seperti; rasa atau etnis asal, agama, kecacatan, jenis kelamin, usia, status veteran, orientas seksual atau identitas gender.

¹⁶ Youtube, *Statistic*, <http://www.youtube.com/yt/press/id/statistics.html>, diakses tanggal 25 desember 2013.

4. Peniruan identitas

Aktifitas seperti menyalin tata letak saluran pengguna, menggunakan nama pengguna yang sama, atau menyamar sebagai orang lain di komentar, *email* atau video merupakan aktivitas peniruan identitas yang dapat dianggap pelecehan.

5. Ancaman

Konten yang berisi ancaman bahaya fisik yang serius terhadap seseorang atau sekelompok orang tertentu.

6. Membahayakan anak

Mengupload, memberi komentar atau terlibat dalam berbagai aktivitas yang berbau seksual anak dibawah umur.

7. Ketelanjangan atau konten seksual

Konten yang berbau pornografi merupakan hal yang terlarang.

8. Konten kekerasan atau grafis

Konten kekerasan atau menyeramkan yang terutama dimaksudkan untuk memberi kejutan, sensasi, atau hal yang kurang sopan tidak boleh ditayangkan di Youtube.

9. Konten yang merugikan atau berbahaya.

Yang dimaksudkan dengan konten yang merugikan atau berbahaya adalah aktivitas bahaya dan ilegal mencakup pembuatan bom instruksional, permainan mencekik, penggunaan obat keras, atau tindakan lain yang dapat menimbulkan cedera serius. Video yang menggambarkan tindakan berbahaya dapat diizinkan jika tujuan utamanya adalah pendidikan, dokumentar, ilmiah, atau artistik dan tidak ditayangkan secara serampangan.

10. Spam, Pratik penipuan dan scam

Didalam Youtube dilarang membuat konten yang mencoba mengelabui orang lain guna mendapatkan keuntungan finansial untuk diri sendiri.

Setiap pengguna Youtube berpotensi melakukan pelanggaran hak cipta karena hampir semua video yang ada di Youtube memiliki hak cipta

b. Mekanisme penyelesaian sengketa di Yotube

YouTube yang diluncurkan pada Mei 2005 ini telah berkembang demikian pesat. Dengan sekitar 65.000 video baru di-*upload* setiap harinya, Kesuksesan YouTube rupanya bukan tanpa hambatan. Gugatan mengenai dugaan pelanggaran hak cipta adalah tantangan terbesar dalam perjalanan sukses YouTube. Dengan banyaknya dugaan pelanggaran hak cipta yang terjadi di Youtube, Youtube menyediakan jalan penyelesaian sengketa hak cipta di situsnya.

a. Proses Pengajuan dugaan pelanggaran Hak cipta

Apabila ingin memberitahukan dugaan pelanggaran hak cipta, bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana cara melakukan gugatan hak cipta yang ada di halaman hak cipta situs youtube, youtube menyediakan tempat untuk mengajukan gugatan hak cipta di formulir *website*-nya. Permintaan pemberitahuan pelanggaran hak cipta hanya boleh dikirimkan oleh pemilik hak cipta atau agen resmi untuk bertindak atas nama pemiliknya. Jenis-jenis pengaduan pelanggaran hak cipta dapat berupa:

1. Konten yang tidak pantas, dapat berupa video-video yang berbau kekerasan, seksual, dan video-video yang dapat menimbulkan perpecahan antar umat beragama.
2. Muncul di video tanpa izin, apabila anda muncul di konten video seseorang tanpa seizin anda terlebih dahulu.
3. Penyiksaan/pelecehan, yakni video-video penyiksaan atau pelecehan yang dilakukan seseorang kepada anda.
4. Privasi, apabila ada konten video yang menggunakan gambar milik anda.

Pelanggaran hak cipta, apabila seseorang menyalin karya anda yang bermateri hak cipta

c. **Mekanisme penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Pemanfaatan ciptaan yang di dalamnya mengandung hak cipta tanpa siizin atau sepengetahuan si pencipta atau pemegang hak cipta maka dapat menimbulkan sengketa hak cipta. Di dalam ketentuan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sengketa hak cipta dapat terdiri dari sengketa perdata atau pidana. Dalam hal sengketa perdata, maka mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara yakni proses arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan gugatan ke pengadilan niaga.

Upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah upaya penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, jadi apabila para pihak ingin melakukan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus membuat perjanjian yang menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju apabila terjadi sengketa akan melakukan proses penyelesaian dengan arbitrase dan perlu diingat untuk proses arbitrase putusan bersifat *final* dan *binding*, sedangkan untuk alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan perlu diingat bahwa putusan dari alternatif penyelesaian sengketa sangat bergantung pada itikad baik para pihak.

Apabila, putusan alternatif penyelesaian sengketa ini belum memberikan rasa keadilan pada salah satu pihak, maka dapat dilakukan upaya gugatan ke pengadilan niaga. Upaya untuk melakukan penyelesaian sengketa ke pengadilan niaga diatur dalam pasal 55 - 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Mengenai tata cara untuk melakukan gugatan ke pengadilan niaga diatur dalam pasal 60-61 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menyatakan:

Pasal 60¹⁷

1. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
2. Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima

¹⁷ UUHC, pasal 60

tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

3. Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.
4. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
5. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal 61¹⁸

1. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
2. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
3. Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
4. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Jadi menurut rumusan masalah pasal 60-61, prosedur mengajukan gugatan dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur litigasi, gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga kemudian panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan Pencipta dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Penetapan Sementara, Setelah melalui pemeriksaan perkara, gugatan pihak pencipta selaku pihak Penggugat harus diputus dalam tenggang

¹⁸ UUHC, pasal 61

waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang berangkutan.

Dalam prosedur penyelesaian sengketa hak cipta dengan jalur perdata seperti yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa jangka waktu penyelesaian sengketa berlangsung cepat yaitu sidang pemeriksaan gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sidang pemeriksaan perkara di persidangan. Menurut Pasal 60 ayat (5) UUHC gugatan wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pendaftaran perkara di Pengadilan Niaga. Pengaturan yang mempercepat upaya penegakan hak cipta ini juga termasuk upaya hukum banding yang dapat ditempuh, juga penentuan jangka waktu upaya hukum kasasi yang harus diputus paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

d. Mekanisme penyelesaian sengketa menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Seperti yang telah kita ketahui ada beberapa pasal dalam UU ITE yang digunakan sebagai dasar hukum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual di dunia maya. Salah satunya adalah pasal 25 UU ITE yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terdapat pula ketentuan dalam Pasal 32 ayat 1 UU ITE, yang berbunyi:¹⁹

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

¹⁹ UU ITE, pasal 32 (1).

Apabila seseorang melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat 1 UU ITE dapat dikenakan sanksi pidana, yang di atur dalam pasal 48 ayat 1 UU ITE yang berbunyi:²⁰

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Demikian pula Pasal 32 ayat 2 UU ITE yang mengatur larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat 2 UU ITE tersebut, maka orang yang melakukannya dapat dipidana dengan ketentuan pasal 48 ayat 2 yang berbunyi:²¹

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ketentuan pasal 32 ayat 1 UU ITE diperkuat dengan ketentuan pasal 32 ayat 3 UU ITE yang apabila perbuatan dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik, pasal 32 ayat 3 UU ITE berbunyi:²²

Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Atas pelanggaran dari pasal 32 ayat 3 UU ITE dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat 3 UU ITE, yang menyatakan:²³

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

²⁰ UU ITE, pasal 48 (1)

²¹ UU ITE, pasal 48 (2)

²² UU ITE, pasal 32 (3)

²³ UU ITE, pasal 48 (3)

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Apabila perbuatan dalam pasal 32 ayat 1, 32 ayat 2 dan 32 ayat 3 UU ITE tersebut di atas dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka ancaman pidananya menjadi lebih besar, Pasal 36 juncto Pasal 51 ayat 2 UU ITE mengatur ancaman pidana perbuatan tersebut, yang berbunyi:²⁴

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Dari rumusan pasal 51 ayat 2 di atas ancaman pidana apabila dengan sengaja mengakibatkan kerugian bagi orang lain ditambah menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan /atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah, ketentuan pidana ini lebih berat dari pasal 48 yang rata-rata hanya dikenakan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda lima miliar rupiah.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Tanggung jawab hukum yang diberikan Youtube dalam melindungi Hak Cipta pengguna tertuang dalam halaman Hak Cipta disitusnya. Dokumen hukum tersebut merupakan perjanjian antara Youtube dan pengguna terkait aktifitas di Youtube, dalam halaman Hak Cipta tersebut berisi hak dan kewajiban mengenai Hak Cipta antara pengguna dan Youtube selaku penyelenggara sistem elektronik.
- b. Pengaturan hukum tentang hak cipta diatur didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi merupakan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pengaturan hukum tersebut merupakan perlindungan atas keaslian karya cipta dan hak-hak si pencipta atas karya ciptaannya.

²⁴ UU ITE, pasal 51 (2)

2. Perlindungan Hak Cipta yang dilakukan Youtube selaku penyelenggara sistem elektronik dirasa cukup baik, namun terdapat beberapa saran yang mungkin dapat menyempurnakan perlindungan tersebut antara lain:
 - a. Perlu adanya perwakilan Youtube minimal di wilayah ekonomi yang ada (misalnya: ASEAN, OCEANIA, EU, dan sebagainya) sehingga memudahkan pengguna untuk memproses masalah hukum tanpa perlu pergi ke Amerika Serikat.
 - b. Bagi pengguna Youtube disarankan untuk lebih berhati-hati, serta memahami terkait aturan Hak Cipta secara jelas, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gene K. Landy, *The IT/Digital Legal Companion (A Comprehensive Business Guide to Software, IT, Internet, Media and IP Law)*, USA.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Tomatzu Hazumi, *ASIAN copyright handbook Indonesian version*, Asia Pacific Cultural Centre for Unesco, 2004

Tesis

D.Friedman P, *Analisis Hak Konsumen Dalam Hal Perolehan Karya Cipta Lagu Melalui Internet dalam pola peer to perr communication Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Tesis tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

M. Zairul Alam, *Protection of Copyright Management Information in Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal

Muhamad Rakhmanaji, *Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Kasus Perusakan Kedutaan Besar Inggris di Iran*, ALSA Indonesia, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Konvensi International

Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) yang mencakup *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips)* (UU No.7 Tahun 1994)

Berne Convention : Protection of Literary & Artistic Work (Kepres No.8 Tahun 1997)

Paris Convention : Protection of Industrial Property and Convention Establishing World Intellectual Property Organization (WIPO) (Keppres No.15 Tahun 1997)

WIPO Copyright Treaty (Keppres No.19 Tahun 1997)

Internet

Hitwise, 2013, **Survei Pengguna YouTube**,
<http://www.hitwise.com/news/yt2012.html>, (13 agustus 2013)

Larry Lessig, *Introduction of Cyberspace, Cyberspace Law for Non-Lawyers*,
Http://www.eff.org/legal/Cyberlaw_Course/Cyberlaw.001, (13 agustus 2013)